

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, kebutuhan akan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah sudah menjadi tuntutan bersama. Menguatnya tuntutan tersebut menuntut instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas kegiatan dan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berhasil tidaknya pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media akuntabilitas yaitu dilakukan secara berkala (Edlin 2018).

Pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah. LKPD yang disajikan pemerintah daerah harus mampu memberikan informasi keuangan yang berkualitas (Siwambudi dkk., 2017).

Kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengikuti kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip yang berlaku. Dengan cara ini, pemerintah daerah diharapkan untuk fokus pada informasi yang diperkenalkan

dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Jelas, laporan keuangan yang disajikan membutuhkan pengawasan dan prinsip-prinsip yang sesuai. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka merupakan suatu pekerjaan yang substansial untuk mengakui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai laporan keuangan (Desipradani dan Nuraini, 2018).

Penilaian atas kualitas laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melaksanakan audit setiap tahunnya. Hasil penilaian BPK dinyatakan dalam 4 (empat) bentuk opini. Untuk kualitas terbaik, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) artinya auditor meyakini, mengingat bukti audit yang dikumpulkan, bahwa laporan keuangan dibebaskan dari kesalahan atau kekeliruan material. Opini kedua adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan mengingat meskipun terdapat kekeliruan, namun secara umum kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Opini paling buruk adalah Tidak Wajar (TW) opini diberikan karena auditor meyakini, berdasar bukti yang telah dikumpulkannya, bahwa laporan keuangan mengandung banyak kesalahan atau kekeliruan material. Ini menyiratkan bahwa laporan keuangan tidak cukup menggambarkan kondisi keuangan secara wajar. Tidak Memberikan Pendapat (TMP) terjadi ketika auditor tidak bisa

mendapatkan bukti yang diharapkan untuk menyimpulkan dan menyatakan apakah laporan telah disajikan dengan akurat atau salah (Irwan, 2011 dalam Julianti, 2015).

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Ternate mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya mulai sekitar tahun 2014 atas laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah tahun 2020 oleh Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara pada acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tanggal 21 Mei 2021. Menurut Walikota Ternate, Laporan keuangan merupakan jenis akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota untuk tahun anggaran 2020 yang dimulai dengan pemeriksaan intern dan berlanjut dengan pemeriksaan substantif dan mereka memahami bahwa meskipun laporan keuangan Pemkot 2020 mendapat opini WTP, dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan beberapa kelemahan, antara lain ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kelemahan sistem internal (ternatekota.com).

BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus segera ditindaklanjuti dan ditangani oleh Pemprov Maluku Utara, yaitu:

1. Terdapat potensi kekurangan penerimaan pajak air permukaan;
2. Perjanjian kerja sama pemanfaatan fasilitas pelabuhan dan pengelolaan penerimaan kontribusi laba operasional kerja sama pemanfaatan fasilitas

pada Dinas Kelautan dan Perikanan belum sesuai ketentuan, diantaranya belum dilengkapi dengan persetujuan Gubernur dan tarifnya belum menyesuaikan dengan Perda No.5 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah;

3. Sebanyak 28 penerima hibah dan 68 penerima bantuan sosial belum menyampaikan laporan penggunaan dana yang diterimanya;
4. Pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai, di antaranya pencatatan aset tetap dalam aplikasi SIMDA BMD belum seluruhnya dilengkapi informasi lokasi, luas, dan kode tanahnya, serta status tanah.

Menurut Walikota Ternate, Pemkot juga bersungguh-sungguh dan berupaya menyelesaikan rekomendasi penemuan hasil pemeriksaan BPK, termasuk penemuan tahun sebelumnya yang belum selesai, mereka berusaha mencari solusi yang terbaik dan efektif agar rekomendasi hasil pemeriksaan yang berkaitan temuan kerugian keuangan Negara atau daerah agar segera ditindaklanjuti (indotimur.com).

Mendapatkan opini tertinggi atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Ternate terpercaya untuk tujuh kali berturut-turut telah menjadi suatu fenomena yang sangat menarik perhatian penulis untuk meneliti faktor apakah yang mempengaruhi kualitas LKPD Kota Ternate sehingga mendapat opini WTP dari BPK.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dibahas dalam penelitian ini, faktor yang pertama adalah Kompetensi Aparatur pemerintah daerah. Aparatur adalah pribadi utama dan bawaan dari seseorang yang memungkinkan orang itu untuk melakukan/ menghasilkan kinerja yang sangat baik untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes) (Ngguna dkk., 2017). Semakin baik kompetensi

aparatur pemerintah daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan, karena penempatan aparatur pemerintah daerah sesuai dengan keahliannya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sebaliknya jika kompetensi aparatur pemerintah daerah tidak baik atau tidak berkompeten dalam menyusun laporan keuangan maka akan memengaruhi kualitas laporan keuangan, karena sumber daya aparatur yang gagal memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada ketidaksesuaian laporan keuangan yang dibuat dengan standar pemerintah, tidak hanya itu kesalahan dan kekeliruan akan terjadi dalam laporan keuangan yang telah dibuat.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab untuk mencapai sasaran anggaran (Uppa 2020). Jika kejelasan sasaran anggaran baik maka kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik karena adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebaliknya jika kejelasan sasaran anggaran tidak baik maka kualitas laporan keuangan tidak baik, karena sasaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, tekanan dan ketidakpuasan dari pegawai. Oleh sebab itu, kejelasan sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan

dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung-jawab untuk menyusun dan melaksanakannya.

Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu adanya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal berfungsi untuk memberikan kepercayaan dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi, khususnya dalam menciptakan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan memudahkan proses audit laporan keuangan (Tawaqal & Suparno, 2017). Semakin baik sistem pengendalian nternal yang diterapkan maka akan lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena Sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu pemerintahan akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga akan memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya pengamanan asset Negara dan keandalan laporan keuangan daerah pemerintah, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, jika sistem pengendalian internal lemah maka akan sulit mendeteksi kecurangan proses akuntansi sehingga dapat menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi tersebut menjadi tidak relevan.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat sekarang ini memberikan banyak akomodasi di berbagai aspek kegiatan bisnis. Perkembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam suatu perusahaan sangat mempengaruhi secara nyata dalam pemrosesan data dari

sistem manual ke sistem komputer dan munculnya software untuk akuntansi yang akan mempermudah dalam membuat laporan keuangan (Wardani 2017). Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan, karena adanya teknologi informasi ini dapat membantu otoritas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah dan mempermudah pengelolaan data keuangan secara sistematis. Pemanfaatan teknologi informasi ini akan meminimalisasi berbagai kesalahan yang diakibatkan oleh human error, karena semua kegiatan pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Sebaliknya jika pemanfaatan teknologi informasi tidak baik maka kualitas laporan keuangan tidak baik, karena kurangnya teknologi informasi yang dimiliki keakuratan dalam perhitungan akan menjadi lambat dan menghambat pemrosesan serta penyimpanan laporan dan output lainnya tidak tepat waktu. Kendala yang menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di pemerintahan belum optimal.

Hasil penelitian tentang pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Amelia (2019), Hidayati (2020) dan Hidayat dkk. (2021) menemukan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut penelitian Fauziyah (2019), Zalni (2021) dan Harun (2021) yang menemukan bahwa kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Sari (2017) Harianto dkk. (2021) dan Marbun (2021) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan menurut penelitian Kartika & Sukamto (2019), Sitompul (2020) dan Fitriana dkk. (2018) yang menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Hakim (2017), Harnoni (2016), dan Mutiana dkk. (2017) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut penelitian Edlin (2018), Gumelar (2017) dan (Inasari 2018) menemukan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Maysaroh, (2018) Armel (2017) dan Zubaidi dkk. (2019) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut penelitian Harnoni (2016), Wahyuningsih (2018) dan Riandani (2017) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian fenomena dan ketidakkonsistenan temuan hasil-hasil penelitian tersebut sehingga penelitian ini mencoba menguji kembali tentang

“Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada OPD Kota Ternate)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Ternate dalam rangka meningkatkan kualitas laporannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan informasi juga data yang konkrit untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Organisasi Perangkat Daerah kota Ternate.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumbangan bagi kemajuan ilmu akuntansi dan menambah kajian ilmu akuntansi. Khususnya akuntansi pemerintahan dalam mengetahui seberapa besar pengaruh

kompetensi aparatur pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.